

PERAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI DESTINASI WISATA LEMBAH HARAU UNTUK MENJAMIN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN

Hairul Anwar^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}hairularar@gmail.com, ^{b)}jumiati@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

20-01-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Pembangunan Pariwisata,
Pariwisata Berkelanjutan,
Lembah Harau

Keywords:

Tourism Development,
Sustainable Tourism, Harau
Valley

Corresponding Author:

hairularar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini penting mengingat potensinya sebagai model destinasi wisata yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan sosial budaya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata menjalankan lima peran utama: pengelola, perencana, regulator, koordinator, dan stimulator dalam pengembangan kawasan. Implementasi peran tersebut didukung oleh keunggulan daya tarik wisata alam, aksesibilitas yang baik, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Namun, terdapat beberapa kendala signifikan seperti rendahnya pemahaman konsep pariwisata berkelanjutan di kalangan pemangku kepentingan, keterbatasan anggaran pengembangan, dan lemahnya koordinasi antarsektor. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan penguatan aspek perencanaan strategis, peningkatan sistem pengawasan, dan optimalisasi promosi budaya lokal untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Lembah Harau.

ABSTRACT

This research examines the role of the Tourism, Youth and Sports Office of Lima Puluh Kota Regency in sustainable tourism development in the Harau Valley and identifies supporting and inhibiting factors. Sustainable tourism development in this area is important given its potential as a model tourist destination that combines economic growth with environmental and socio-cultural preservation. The research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques, including field observations, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis shows that the Tourism Office carries out five primary roles: manager, planner, regulator, coordinator, and stimulator in the area's development. Implementing these roles is supported by the advantages of natural tourism attractions, good accessibility, and the availability of supporting facilities. However, significant obstacles exist, such as a low understanding of sustainable tourism among stakeholders, a limited development budget, and weak coordination between sectors. Based on these findings, it is recommended that aspects of strategic planning be strengthened, the supervision system be improved, and local culture be promoted to realize sustainable tourism development in the Harau Valley.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.248>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Berdasarkan laporan World Travel and Tourism Council (2023), sektor pariwisata menyumbang 9,1% terhadap PDB global serta menciptakan 27 juta lapangan kerja baru. Di Indonesia, kontribusi sektor ini terhadap PDB mengalami peningkatan dari 3,9% pada tahun 2022 menjadi 5,7% pada tahun 2023. Sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional (Sulistiyadi et al., 2019), pariwisata menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis keberlanjutan dalam pengembangannya.

Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) menyerukan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Sulistiyadi et al., 2019). Menurut The United Nations World Tourism Organization (Sunarta & Arida, 2017), konsep pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, guna memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat lokal. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek ekologis, ekonomi, etika, serta sosial budaya. Dewi (2011) menambahkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dengan menekankan pertumbuhan jangka panjang serta pelestarian nilai budaya lokal.

Di Indonesia, prinsip pariwisata berkelanjutan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa sektor pariwisata harus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 memperjelas bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi masyarakat dengan berfokus pada aspek pengelolaan, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan juga diakomodasi dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032 menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berlandaskan prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan ini menekankan tata kelola yang baik, koordinasi lintas sektor dan daerah, serta kemitraan antara sektor publik dan swasta, dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan agama sebagai basis utama destinasi wisata.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor pariwisata. Peran dinas ini diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016, yang menetapkan tugas dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta merumuskan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan. Dalam konteks tata kelola yang baik (Good Tourism Governance), Sunaryo (2013) mengidentifikasi sepuluh indikator keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu: partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, pengakomodasian aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya.

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa tantangan terkait peran-perannya yang belum sepenuhnya optimal. Sebagai Perencana (Planner), salah satu masalah utama adalah perubahan lahan yang berdampak pada lingkungan. Sebagai Regulator, Dinas Pariwisata juga dihadapkan pada tantangan pengaturan pengembangan pariwisata. Banyak tempat wisata, homestay, dan kafe yang berkembang tanpa perencanaan yang matang atau izin yang sah, sehingga menciptakan ketidakteraturan dalam tata ruang.

Sebagai Stimulator, Dinas Pariwisata juga memiliki peran dalam mempromosikan budaya lokal. Kehadiran atraksi wisata yang dipengaruhi gaya luar negeri memang

membawa dampak positif dalam aspek ekonomi, namun juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat tentang hilangnya identitas budaya lokal. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip tata kelola pariwisata yang baik menurut Sunaryo (2013), terutama dalam aspek pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta promosi dan advokasi nilai budaya.

Secara keseluruhan, untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Lembah Harau, sangat diperlukan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, penghargaan terhadap budaya lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang lebih ketat, serta promosi budaya lokal, Lembah Harau dapat menjadi destinasi wisata yang berkembang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek ekologis maupun sosial budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada peran Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan pariwisata, terdiri dari 10 orang, termasuk pejabat Dinas Pariwisata, Pihak Kenagarian, pelaku usaha lokal, pengunjung, dan masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait.

Analisis data menggunakan metode Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data dengan menyaring dan mengkategorikan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan merumuskan rekomendasi. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan temuan yang akurat dan mendalam terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Destinasi wisata Lembah Harau yang terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima

Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu destinasi wisata unggulan dengan daya tarik alam yang luar biasa. Kawasan ini dikenal dengan tebing-tebing curam, air terjun, dan pemandangan alam yang menakjubkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2016, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pariwisata, termasuk pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata Lembah Harau. Pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan ini menuntut peran aktif Dinas Pariwisata dalam merencanakan kebijakan, mengelola pengembangan destinasi, serta membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan, peran pemerintah dapat dianalisis menggunakan teori Cooper dan Hall (2008), yang mencakup lima aspek utama:

Sebagai Pengelola

Dinas Pariwisata bertindak dalam mengelola kawasan wisata, terutama di Resort Aka Barayun yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pentas seni, mushola, kolam anak, wahana sepeda air, dan area parkir. Semua fasilitas tersebut dikembangkan dengan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan budaya. Pengelolaan sampah di kawasan ini juga dilakukan secara sistematis bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pihak swasta untuk menjaga kebersihan. Setiap pembangunan fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.

Sebagai Perencana

Dinas Pariwisata berperan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), yang berfokus pada pengembangan destinasi yang ramah lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Rencana ini mencakup program strategis seperti penyelenggaraan event tahunan untuk memperkenalkan budaya lokal, serta pelatihan manajemen pariwisata dan keterampilan ekonomi kreatif bagi masyarakat. Periode perencanaan strategis yang telah ditetapkan adalah 2021-2026, dengan visi yang mengedepankan kelestarian alam dan

optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam pengelolaan wilayah secara menyeluruh.

Sebagai Pengatur

Dinas Pariwisata bertanggung jawab dalam menetapkan regulasi yang memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal. Regulasi yang diterapkan mencakup pemanfaatan lahan, penerapan AMDAL, pengaturan zonasi, serta pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Standar operasional juga diterapkan bagi pengusaha pariwisata, termasuk pengelola homestay dan fasilitas wisata lainnya. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, seperti belum adanya aturan spesifik mengenai integrasi budaya lokal dalam desain bangunan dan pengelolaan fasilitas wisata. Selain itu, pengaturan zonasi yang belum optimal berpotensi menyebabkan penyalahgunaan lahan yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan pariwisata.

Sebagai Koordinator

Dalam perannya sebagai koordinator, Dinas Pariwisata membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, maupun akademisi untuk memastikan keberlanjutan pariwisata. Koordinasi ini meliputi pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, promosi budaya lokal, hingga peningkatan kualitas layanan wisata. Dengan kerja sama yang solid, daya tarik Lembah Harau sebagai destinasi wisata unggulan dapat semakin meningkat. Meskipun demikian, tantangan koordinasi masih ditemukan, misalnya dalam pengaturan kapasitas penginapan agar tidak melebihi daya tampung yang dapat menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Selain itu, penataan tempat usaha juga masih perlu diperhatikan agar estetika kawasan wisata tetap terjaga dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal.

Sebagai Stimulator

Dinas Pariwisata mendorong perkembangan pariwisata melalui penyelenggaraan event seperti Pasa Harau, yang bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Event ini juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal, yang semakin berkembang dengan adanya pelatihan ekonomi kreatif yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. Pelatihan

tersebut membekali masyarakat dengan keterampilan manajemen usaha dan promosi, sehingga mereka dapat mengelola usaha pariwisata secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Dalam menganalisis implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau, teori Good Tourism Governance yang dikemukakan oleh Sunaryo (2013) menjadi relevan. Teori ini menekankan prinsip pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan mengacu pada sepuluh indikator keberhasilan, yaitu partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, kemitraan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan bagi masyarakat, serta promosi dan advokasi nilai budaya. Dengan penerapan indikator-indikator tersebut, pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai perbandingan, implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau dapat dikomparasikan dengan pengelolaan pariwisata di Ubud, Bali. Ubud dikenal dengan keberhasilannya dalam menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, budaya lokal, dan perkembangan ekonomi masyarakat. Keberhasilan Ubud dalam menerapkan prinsip Good Tourism Governance tampak dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, regulasi ketat terhadap pembangunan akomodasi, serta strategi pemasaran berbasis budaya yang kuat. Di sisi lain, Lembah Harau masih menghadapi beberapa kendala dalam regulasi dan partisipasi masyarakat yang perlu diperkuat agar mencapai keberlanjutan yang lebih optimal.

Temuan dalam studi ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Pitana dan Gayatri (2005), yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Studi lain oleh Subadra (2006) menunjukkan bahwa perencanaan pariwisata yang berbasis keberlanjutan dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata serta kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di Lembah Harau perlu terus

diperkuat dengan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Faktor Pendukung

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau bergantung pada empat faktor utama menurut teori Cooper et al. (1993), yaitu Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Fasilitas, dan Layanan Pendukung.

- a) Daya Tarik Wisata: Keindahan alam Lembah Harau, seperti tebing granit dan air terjun, serta kekayaan budaya lokal menjadi daya tarik utama. Pelestarian alam dan budaya sangat penting untuk menjaga daya tarik ini agar tetap berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.
- b) Aksesibilitas: Infrastruktur yang baik mempermudah wisatawan untuk mengakses Lembah Harau, meningkatkan frekuensi kunjungan, dan mendukung sektor ekonomi lokal. Pembangunan jalan dan sistem transportasi yang efisien sangat penting untuk kenyamanan wisatawan.
- c) Fasilitas: Fasilitas yang berkualitas, seperti akomodasi, restoran lokal, dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kenyamanan wisatawan dan membuat mereka betah berkunjung. Pembangunan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.
- d) Layanan Pendukung: Promosi yang efektif dan pengelolaan destinasi yang terorganisir dengan baik sangat penting. Keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas, dan pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas wisatawan.

Faktor Penghambat

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya. Dodds dan Butler (2009) mengidentifikasi beberapa hambatan:

- a) Rendahnya Kesadaran dan Edukasi: Pelaku usaha sering mengabaikan prinsip keberlanjutan, lebih fokus pada keuntungan jangka pendek. Edukasi mengenai pariwisata ramah lingkungan perlu ditingkatkan.
- b) Minimnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat masih kurang. Semua pihak harus lebih terlibat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya.

- c) Keterbatasan Pendanaan: Dana terbatas untuk pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, sehingga pengelolaan pariwisata berkelanjutan terkendala. Kerjasama dengan sektor swasta diperlukan untuk memperoleh dana tambahan.

PENUTUP

Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Lembah Harau menuntut peran aktif Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pengelola, perencana, pengatur, koordinator, dan stimulator dalam mendukung pengembangan destinasi yang berbasis lingkungan, sosial, dan ekonomi. Implementasi teori Cooper dan Hall (2008) menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.

Selain itu, faktor pendukung pariwisata menurut teori Cooper et al. (1993), seperti daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas, dan layanan pendukung, menjadi elemen kunci yang harus dioptimalkan. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran akan keberlanjutan, minimnya keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterbatasan pendanaan masih menjadi penghambat utama sebagaimana dikemukakan oleh Dodds dan Butler (2009).

Dari perspektif teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori pembangunan pariwisata berkelanjutan serta konsep Good Tourism Governance dalam pengelolaan destinasi wisata. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Pitana dan Gayatri (2005) serta Subadra (2006), yang menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di destinasi wisata. Selain itu, pendekatan berbasis regulasi dan koordinasi yang optimal dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan.

Dari segi implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus dalam meningkatkan regulasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta

memastikan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan edukasi dan pelatihan pariwisata berkelanjutan bagi pelaku usaha dan masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih sadar lingkungan dan sosial. Selain itu, optimalisasi skema pendanaan, baik melalui investasi swasta maupun program hibah pariwisata, dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1993). *Tourism: Principles and Practice*. Longman Group UK.
- Cooper, C., & Hall, C. M. (2008). *Contemporary tourism: An international approach*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan Ekowisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dewi, N. P. (2011). *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dodds, R., & Butler, R. W. (2008). Sustainable tourism in the developing world. *Tourism in the Developing World: A Critical Review. Journal of Sustainable Tourism*, 17(6), 629-645.
- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032*. Kabupaten Lima Puluh Kota: Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Sulistiyadi, H., Zulkarnain, D., & Purnama, A. (2019). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarta, I., & Arida, D. (2017). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Asia Pasifik*. Bali: Bali Press.
- Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. (2023). Good Tourism Governance dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 658-666.
- World Tourism Organization (UNWTO). (2020). *Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030*. Diakses dari <https://www.unwto.org/sustainable-development>.
- World Travel & Tourism Council (WTTC). (2023). *Travel & Tourism Economic Impact 2023*. Diakses dari <https://wttc.org/>.